

HARMONI DALAM KERAGAMAN

(Sebuah Analisis tentang Konstruksi Perdamaian Antar Umat Beragama)

Nurkholik Affandi*

Abstrak: Harmony in diversity in the religious life is a necessity that must be striven for, especially about plurality of live between religious communities. Viewed from the aspect of construction peace theory, the life between religious communities formed by some elements, such as: effective channels of communication, effective system of arbitration, integrative climate (bridging social capital), critical mass of peace enhancing leadership and just structure. The construction peace between the religious communities raises in the form of dialogue between the religious communities and civic association that institutionalized in the society life in the form of the religious rituals and social activities of the society.

Kata Kunci: Harmoni, Keragaman, Konstruksi, Perdamaian, Umat Beragama.

PENDAHULUAN

“Harmony in Diversity”, adalah sebuah harapan dalam setiap kehidupan keberagamaan masyarakat yang harus dipandang secara optimis untuk merealisasikan hal tersebut. Namun secara fatual kerukunan hidup antar umat beragama di Indonesia khususnya masih menghadapi banyak hambatan dalam pencapaiannya. Berdasar Laporan Tahunan Kehidupan Beragama Tahun 2010 yang di keluarkan oleh CRCS, ada dua masalah yang menjadi tantangan dalam menciptakan kerukunan dan kebebasan dalam beragama, yaitu: masalah rumah ibadah dan penyesatan. Tercatat sebanyak 39 masalah kerukunan hidup antar umat adalah masalah rumah ibadah, dimana 32 kasus diantaranya menyangkut hubungan antar umat beragama.¹

*Dosen tetap STAIN Samarinda

¹Bagir, Zainal Abidin, dkk., *Laporan Tahunan Kehidupan Beragama di Indonesia*, (Yogyakarta: CRCS UGM, 2011), hal. 33-34

Konflik-konflik yang melibatkan perbedaan keyakinan (antar umat beragama) berpotensi yang tinggi terhadap terjadinya tindak kekerasan, main hakim sendiri, justifikasi sebuah kebenaran atau keyakinan kelompok satu dengan kelompok lainnya menjadi sumber konflik ideologi yang akhir-akhir ini muncul di Indonesia. Agama memberikan kontribusi yang luar biasa bagi para pemeluknya, terutama menyangkut pola pikir, pola sikap dan pola perilaku individu dalam masyarakat. Pola pikir individu yang dipengaruhi agama, pada dasarnya masuk dalam ranah pengetahuan dan pemahaman keagamaan, dimana agama yang berisikan doktrin atau ajaran-ajaran memiliki sifat memaksa terhadap pemeluknya untuk mengikuti apa yang diajarkan oleh agama. Agama dengan doktrin-doktrin yang dimilikinya, secara psikologis memiliki dampak yang luar biasa bagi perkembangan individu, terutama menyangkut pola pikir seseorang.

Masalah kerukunan hidup antar umat beragama bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, akan tetapi juga menjadi tanggung jawab seluruh umat manusia di dunia ini. Terbukti pada hari Minggu (6/2/2011) lalu di adakan Pekan Kerukunan Antar-Umat Beragama Sedunia (*The World Interfaith Harmony Week*) di Istora Senayan, Jakarta, untuk membangun kerukunan beragama di dunia tanpa kekerasan. *The World Interfaith Harmony Week* diprakarsai oleh Raja Jordania Abdullah II saat pertemuan tahunan sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sekitar bulan September 2010 yang digelar setiap awal Februari. Acara dihadiri perwakilan tokoh-tokoh agama, antara lain Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Slamet Effendy Yusuf, Ketua Komisi Hubungan Antar-Agama dan Kepercayaan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) Mgr Petrus Canisius Mandagi, Ketua Umum Majelis Tinggi Agama Konghucu (Matakin) Wawan Wiratma, Wakil Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) I Dewa Putu Sukardi, dan Sekretaris Jenderal Perwakilan Umat Budha Indonesia (Walubi) Philip Wijaya. Juga Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Taufiq Kiemas, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Marzuki Alie, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman, dan Sekretaris Jenderal World Conference on Religion and Peace (WCRP) William Vandley.²

²*Pekan Kerukunan Antar Umat Beragaman,*

Lebih lanjut dalam acara tersebut, para tokoh dan pemuka agama diberi kesempatan memberikan sambutan dan dukungan terhadap terciptanya kerukunan hidup antara umat beragama. “Kami yakin ini ekspresi umat beragama untuk mendukung kebhinekaan di Indonesia,” ungkap Romo Antonius Benny Susetyo Pr sebagai ketua pantia saat membuka acara. Diharapkan, kegiatan tokoh-tokoh agama mendukung kerja pemerintah dalam membangun kerukunan antarumat beragama di Indonesia. Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, juga Ketua Presidium Inter-Religious Council (IRC), M Din Syamsuddin berharap Pekan Kerukunan Antar-Umat Beragama Sedunia mendorong dialog antarumat beragama untuk mewujudkan kerukunan antarumat beragama di Indonesia. “Bisa membentuk keakraban bagi kita semua umat beragama.” Kerukunan umat beragama harus terus menerus ditingkatkan dan dikembangkan oleh unsur-unsur masyarakat Indonesia tanpa kecuali. sebagai agenda tahunan PBB, Pekan Kerukunan Antar-Umat Beragama Sedunia bertema “Harmony in Diversity” kali ini mendukung perwujudan kerukunan antarumat beragama. Menurutnya, Indonesia sebagai bangsa majemuk, memiliki modal untuk mewujudkan kerukunan antarumat beragama yang terjalin lama kendati sempat terganggu beberapa fase waktu. Misalnya, pada awal gerakan reformasi, terjadi konflik di Ambon (Maluku) dan Poso (Sulawesi Tengah). “Kita harus menjalin persatuan dan kesatuan lewat kehidupan beragama.”³

Sedangkan Slamet Efendi Yusuf selaku perwakilan dari Kemenag mengatakan bahwa harmoni antaragama sangat penting untuk mewujudkan perdamaian. “Harmoni bisa tercapai jika ada keadilan ekonomi, politik, dan sosial,” ujarnya. Tokoh-tokoh agama bersama elemen masyarakat harus mengupayakan pencapaian keadilan di tengah-tengah masyarakat. Sementara itu, Irman mengatakan, Pekan Kerukunan Antar Umat Beragama se-Dunia adalah wujud komitmen dan kepedulian masyarakat dunia dalam mempromosikan nilai-nilai saling percaya dan saling pengertian di antara berbagai agama. Tujuannya, menciptakan tata dunia yang damai dan harmonis. “Dunia tanpa kekerasan, dunia tanpa terorisme, dunia tanpa konflik antar agama, dan dunia tanpa perang,”

dalam <http://dpd.go.id/2011/03/pekan-kerukunan-antar-umat-beragama-sedunia/>, tanggal 01 maret 2011

³*Ibid.*

ujarnya. Mencapainya, diperlukan usaha bersama antara pemuka agama dan pimpinan lembaga negara (eksekutif, legislatif, yudikatif), masyarakat madani, media massa, lembaga swadaya masyarakat (LSM), aktivis atau penggiat demokrasi. “Kita semua merajut kebersamaan, menghormati perbedaan sebagai suatu karunia, menghilangkan rasa curiga, dan saling pengertian di antara sesama.”⁴

Di tengah-tengah beragam persoalan bangsa tersebut (baik kemiskinan, pengangguran, korupsi, serta ketidakadilan ekonomi, hukum, dan sosial) maka peran tokoh-tokoh agama sangat penting untuk memberi pencerahan dan suri teladan bagi umat, membangun kepercayaan terhadap diri sendiri dan orang lain, serta mengajak umat untuk mendekati kemaslahatan dan menjauhi kemungkaran. Pernyataan senada disampaikan Taufiq dalam sambutannya. Ia mengatakan, Indonesia beruntung dianugerahi lima agama yang dianut oleh masyarakatnya. Anugerah tersebut harus dijaga melalui jalinan persaudaraan asalkan berpegang teguh kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika. Marzuki menyambut dibentuknya wadah berkomunikasi antaragama, IRC Indonesia. Agama menjadi tolok ukur pembangunan akhlak generasi muda di masa-masa mendatang. “Kita menciptakan kerukunan antarumat beragama meskipun berbeda-beda. Melalui agama, juga diharapkan mengajarkan akhlak agar generasi kita tidak korupsi.”⁵

Fenomena tersebut diatas menunjukkan bahwa betapa pentingnya arti kerukunan hidup antar umat beragama dalam sebuah cita-cita yang mulia “harmoni in diversity” dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam rangka merealisasikan kondisi yang dicita-cita tersebut di atas tentu merupakan sebuah perjuangan yang sangat panjang dan memerlukan keterlibatan dari semua unsur baik dari pihak pemerintah maupun kalangan agama. Secara teoritis fenomena untuk menciptakan harmoni dalam keragaman dalam bingkai kerukunan hidup antar umat beragama, dapat dilihat dari perspektif teori konstruksi perdamaian yang meliputi beberapa unsur antara lain: *effective channels of communication, effective system of arbitration, integrative climate (Bridging social capital), critical mass of peace enhancing leadership* dan *just structure*.

⁴*ibid*

⁵*Ibid*

PEMBAHASAN

Agama dalam perspektif sosiologis dapat dilihat dari adanya fenomena-fenomena keagamaan yang muncul dalam masyarakat, baik dalam bentuk ritual, perayaan maupun simbol-simbol keagamaan, sehingga agama tumbuh dan berkembang menjadi bagian dari budaya masyarakat. Agama yang menjelma dalam bentuk budaya inilah yang menuntut adanya dialektika internalisasi eksternalitas dan eksternalisasi internalitas. Sehingga agama muncul istilah misi keagamaan dalam bentuk budaya.⁶ Berdasar hal tersebut, maka eksistensi agama dalam masyarakat memiliki potensi integratif dan potensi konflik.

Secara sosiologis agama memiliki peran sebagai pemersatu (integratif) bagi umat beragama yang sama. Fungsi integratif ini biasanya menjadi luntur atau melemah ketika dalam kehidupan beragama melibatkan unsur-unsur keyakinan yang berbeda. Menurut Hendropuspito agama memiliki fungsi sebagai pemupuk persaudaraan terutama internal umat beragama. Namun ibarat sisi mata uang agama dalam realitas sosial memiliki peran ganda antara fungsi integratif maupun fungsi disintegratif, tergantung konteks hubungan internal atau eksternal umat beragama⁷. Dalam konteks internal umat beragama inilah agama lebih berperan sebagai pemersatu (integratif), sekalipun juga tidak menutup kemungkinan terjadi disintegratif, terutama ketika melibatkan perbedaan-perbedaan faham dalam suatu agama atau kepercayaan.

Tanpa mengurangi kontribusi agama dalam kehidupan sosial terutama bila ditinjau dari fungsi integratif, ada faktor-faktor lain selain agama yang ikut berpengaruh terhadap integrasi sosial. Faktor-faktor tersebut, bila ditinjau dari teori perdamaian, meliputi beberapa hal antara lain: *an effective channels of communication, consultation and negotiation, peace-enhancing structure and institutions, an integrative political-psychological climate, a critical mass of peace building leadership, and a supportive international environment.*⁸ Secara lebih rinci

⁶Ritzer, George, Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi dari teori Sosiologi Klasik sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern*, Kreasi wacana, Yogyakarta, 2010, Judul asli *Sociological Theory*, Mc.Graw-Hill, New York, 2004), p.581

⁷Hendropuspito, *Sosiologi Agama*, (Yogyakarta, 1984: Kanisius), h.57-58

⁸Reychler, Luc., *Challenges of Peace Research*, (International Journal of Peace Studies, Volume 11, Number I: Spring/Summer, 2006), p. 6

dan operasional Muhammad Iqbal menggambarkan konstruksi perdamaian dalam table berikut:

Gambar.1
Konstruksi Perdamaian

Pilar	Channels of Communication	Arbitration System/ Institution	Integrative climate (social capital)	Peace Leadership	Just Structure
Aktor, Lembaga	Forum pertemuan warga; asosiasi, media dialog; sistem informasi	<u>Formal</u> : pengadilan, peraturan organisasi; perangkat dan penegakan hukum <u>Informal</u> : lembaga adat, institusi/otoritas keagamaan, dst.	Organisasi sosial/asosiasi lintas (bridging) identitas/kelompok (contoh: kelompok hobi, sport, asosiasi bisnis, ronda, dll.)	Tokoh agama/adat, LSM, pelaku akar rumput, pemerintah, pengusaha, politisi.	Sistem politik, hukum, birokrasi (good government) dll.
Peran	Diskusi, klarifikasi, rumor control, penyelesaian konflik dengan jalan non-kekerasan		Membangun trust, membendung politik identitas	Promosi jalan non-kekerasan, de-mobilisasi ekstrimisme	Menciptakan keadilan sebagai fondasi perdamaian.

Sumber: Materi Short-course CRCRS-Kemenag RI 14 Nop s/d 14 Desember 2011, oleh M. Iqbal Ahnaf

Berdasar gambar tersebut dapat dijelaskan secara rinci mengenai unsur-unsur atau komponen-komponen konstruksi perdamaian dalam masyarakat. Komponen tersebut meliputi: *effective channels of communication*, *effective system of arbitration*, *integrative climate (Bridging social capital)*, *critical mass of peace enhancing leadership* dan *just structure*.

Faktor pertama yang berkontribusi terhadap terciptanya perdamaian suatu masyarakat adalah *effective channels of communication*. Saluran komunikasi yang efektif merupakan faktor yang menentukan terciptanya sebuah perdamaian dan harmoninya sebuah tata hubungan antar anggota masyarakat. Saluran komunikasi yang efektif ditandai dengan adanya intensitas komunikasi antar anggota masyarakat, dimana anggota

masyarakat dapat menyuarakan dan menyalurkan ide-ide atau gagasan sebagai bagian dari anggota masyarakat.

Saluran komunikasi yang efektif akan memberikan peluang bagi anggota masyarakat untuk berkontribusi secara langsung terhadap perkembangan masyarakat, sekalipun hanya sebatas ide atau gagasan. Dengan adanya komunikasi yang efektif, maka permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat akan dapat didiskusikan dan diselesaikan secara seksama. Tanpa adanya saluran komunikasi yang efektif, maka masalah-masalah yang dihadapi menjadi potensi yang dapat menimbulkan perpecahan antar anggota masyarakat terutama pada masyarakat yang heterogin, baik dari aspek sosial, budaya ataupun keyakinan. Dengan demikian saluran komunikasi yang efektif merupakan prasarat utama dalam penciptaan sebuah perdamaian masyarakat menuju kehidupan yang harmoni.

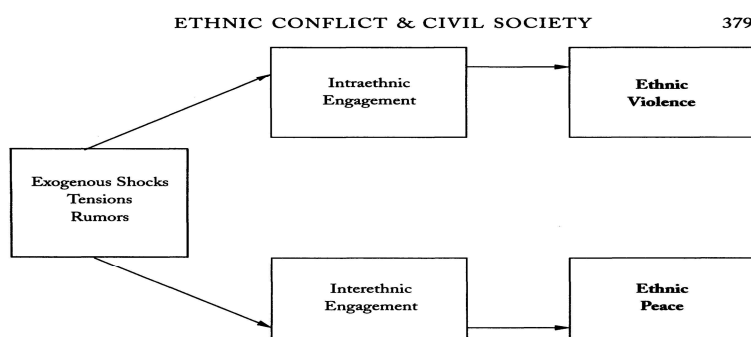
Faktor kedua adalah yang menjadi bagian dari sebuah konstruksi perdamaian adalah *effective system of arbitration*. Pada bagian ini sistem peradilan baik yang bersifat formal maupun non-formal dan informal memiliki peran yang sangat besar bagi terciptanya sebuah perdamaian masyarakat. Melalui sistem peradilan telah melembaga dalam masyarakat akan membantu terciptanya stabilitas keamanan dalam masyarakat. Melalui sistem peradilan yang efektif pula hak-hak individu sebagai anggota masyarakat akan terjamin, tanpa harus khawatir terhadap kekuatan-kekuatan yang ingin menindas atau menguasainya. Dengan adanya *effective system of arbitration* berimplikasi pada sebuah tatanan kehidupan yang berdasar pada kepastian hukum, sehingga batas-batas antara kebenaran dan kebatilan dalam sistem sosial menjadi lebih transparan.

Faktor ketiga adalah *integrative climate (Bridging social capital)*. Faktor ini pada dasarnya tidak bisa dipisahkan dengan komponen konstruksi perdamaian sebelumnya, yaitu adanya saluran komunikasi yang efektif serta sistem peradilan yang efektif. Menurut hemat penulis, faktor ketiga ini lebih mengarah pada kondisi yang merupakan hasil atau akibat dari adanya sistem komunikasi yang efektif serta sistem peradilan yang efektif. Melalui saluran komunikasi yang efektif akan menimbulkan sebuah situasi yang mendukung terhadap pencapaian suatu perdamaian. *Integratif climate*, adalah sebuah situasi dan kondisi yang kondusif dalam masyarakat yang mengarah pada suasana yang harmoni. *Integratif climate*

yang ada dalam masyarakat biasanya ditandai dengan adanya institusi-institusi non-formal yang menjelma dalam sebuah tradisi masyarakat.

Munculnya lembaga-lembaga atau kelompok-kelompok sosial yang biasanya berafiliasi terhadap kepentingan sosial (*civic association*) menjadi salah satu ciri dari *integrative climate* yang ada dalam masyarakat. Adanya *civic association* dalam masyarakat memiliki peran yang sangat strategis dalam menciptakan sebuah perdamaian. Biasanya *civic association* keanggotanya bersifat heterogin baik dari aspek budaya, ekonomi, pendidikan maupun agama. *Civic association* dalam masyarakat pedesaan biasanya menjelma dalam bentuk perkumpulan-perkumpulan, seperti perkumpulan pertanian, peternakan, PKK, Arisan dan organisasi lain sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat.

Pengertian social capital/civic associations, adalah network/relasi antara kelompok/individu dalam masyarakat yang beragam. Bentuk civic association dapat didasarkan pada bidang bisnis atau hobi, misalnya: kelompok tani, asosiasi buruh. Gambar mengenai bentuk dari civic association ini dapat dilihat sebagai berikut:



Sumber: Varshney (2002: 379 dalam Materi Short-course CRCRS-Kemenag RI 14 Nop s/d 14 desember 2011, oleh M. Iqbal Ahnaf, Sumber: Varshney (2002: 379

Varshney menyatakan bahwa“preexisting local networks of civic engagement between the two communities stand out as the single most important proximate explanation for the difference between peace and violence. Where such networks of engagement exist, tensions and

conflicts are regulated and managed; where they are missing, communal identities lead to endemic and ghastly violence.”⁹

Faktor keempat *adalah critical mass of peace enhancing leadership*. Faktor ini terait dengan adanya tokoh-tokoh inisiatif atau kepemimpinan yang dapat mencegah terjadinya konflik. Atau adanya sejumlah tokoh yang cukup jumlahnya dan memiliki pengaruh yang kuat untuk mencegah terjadinya konflik. Keberadaan sejumlah tokoh dalam kehidupan terutama dalam mengatasi konflik yang diperlukan, hal ini disebabkan kedudukan tokoh dalam masyarakat memiliki fungsi sebagai mediator dalam setiap konflik yang terjadi. Tokoh atau pemimpin yang dimaksud dalam hal ini adalah pemimpin formal maupun pemimpin informal. Pemimpin formal biasanya terkait dengan jabatan pemerintahan atau jabatan politis, misalnya lurah, camat, bupati, DPR. Sedangkan pemimpin non-formal biasanya adalah tokoh agama (ulama, kyai, Pastur, Pendeta, Biksu), dan tokoh masyarakat (ketua adat, ketua paguyuban atau persatuan).

Ditinjau dari sosiologi agama fungsi yang diperankan oleh para pemuka agama khususnya, termasuk dalam fungsi profetis. Fungsi ini berorientasi pada peran para pemuka agama sebagai perwakilan agama dalam memberikan kritik atau saran terhadap program-program pemerintah, atau solusi terhadap pemecahan masalah yang dihadapi pemerintah. Fungsi ini dapat dilihat dari beberapa fenomena di negara kita, misalnya adanya sekelompok ulama lintas agama yang membuat mosi ketidakpercayaan terhadap keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Tampilnya beberapa tokoh lintas agama yang senantiasa menyuarakan misi-misi perdamaian, anti kekerasan, anti penindasan antar golongan satu dengan golongan lainnya. Oleh karena itu keberadaan tokoh atau pemimpin yang ikut menuarakan nilai-nilai kedamaian sangat menentukan sekali terhadap terciptanya sistem kepemimpinan yang damai.

Faktor kelima *just structure*. Faktor ini terkait dengan sebuah upaya untuk menciptakan sistem keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. *Just stucture*, meliputi beberapa hal antara lain sistem

⁹Varshney, Ashutosh., *Ethnic Conflic and Civic Life: Hindus and Muslims in India*, (Yale: University Press, 2002), p.375

keadilan ekonomi yang berkeadilan, sistem sosial yang berkeadilan, sistem pendidikan yang mencerdaskan masyarakat dan sistem-sistem sosial lainnya yang mendukung terhadap terciptanya tatanan kehidupan yang berkeadilan. Adanya sistem keadilan dalam masyarakat ini mutlak diperlukan adanya untuk mencapai sebuah tatanan masyarakat yang berkeadilan. *Just stucture*, merupakan sebuah perangkat lunak untuk menciptakan sebuah tananan masyarakat yang tertib sesuai dengan undang-undang yang berlaku. *Just structure* biasanya dalam sistem pemerintah menjelma dalam sistem undang-undang yang berfungsi mengatur tatanan kehidupan dalam bidang ekonomi, pendidikan sosial dan budaya untuk menciptakan kesejahteraan rakyat.

Elemen-elemen konstruksi perdamaian tersebut dalam kehidupan sosial biasanya menjelma dalam bentuk dialog anatar umat beragama yang dilandaskan pada sikap pluralitas kewargaan. Dialog antar umat beragama dalam fenomena kehidupan sosial menurut JB. Banawiratma, Zainal Abidin Baqir,¹⁰ terdapat 7 tataran, antara lain adalah: (1) Dialog kehidupan, (2) Analisis sosial dan refleksi etis kontekstual, (3) Studi tradisi-tradisi agama, (4) Dialog antar umat beragama:berbagai iman dalam level pengalaman, (5) Dialog antar umat beragama:berteologi lintas agama, (6) Dialog aksi dan (7) Dialog intragama.

Dialog antar umat beragama yang terjadi dalam masyarakat pada dasarnya tidak bisa terlepas dari sikap pluralitas kewargaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Pluralitas kewargaan pada dasarnya mengacu pada gagasan, masyarakat yang terdiri dari kelompok-kelompok identitas yang berbeda dapat hidup bersama, khususnya dalam ikatan konteks suatu negara-bangsa yang memepersatukan kelompok yang berbeda.¹¹ Dengan adanya sikap pluralitas kewargaan maka akan muncul sikap kebersamaan dalam masyarakat, tanpa membedakan perbedaaan identatas baik yang menyangkut agama, budaya atau ras.

Khusus dalam konteks keagamaan, perdamaian antar umat beragama biasanya muncul ketika agama diaktualiasaikan dalam traidisi-tradisi keagamaan dalam bentuk ritual dan perayaan keagamaan. Ritual

¹⁰Banawiratma, J.B., Bahir, Zaenal Abidin, Etc., *Dialog Antar Umat Beragama. Gagasan dan Praktik di Indonesia*, (Bandung: Mizan, 2010), hal.8

¹¹Baqir, Zaenal Abidin, dkk., *Pluralisme Kewargaan. Arah Baru Budaya Politik Keragaman di Indonesia*, (Bandung: Mizan, 2011), hal.30

adalah “...prescribed formal behavior for occasions not given over to technological routine, having reference to beliefs in mystical being or powers”.¹² Jadi yang dimaksud dengan ritual adalah kepercayaan terhadap supranatural yang sering dimanifestasikan melalui kegiatan-kegiatan seperti sesaji, berdoa, menyanyi lagu-lagu sakral, sehingga ritual bersifat lebih suci dan keramat.¹³ Selain dalam bentuk ritual, perdamaian antar umat beragama juga muncul dalam kegiatan perayaan keagamaan. Menurut Irwan Abdullah dalam Dictionary of Anthropology, ceremony berasal dari bahasa latin caeremonia yang berarti: “A fixed or sanctioned pattern of behavior which surround various phases of life, often serving religious or aesthetic ends and confirming the group’s celebration of particular situation”.¹⁴

Ritual dan perayaan keagamaan ditinjau dari aspek sosial memiliki peran yang sangat besar terutama ditinjau dari aspek integrative umat beragama. Melalui ritual tingkat intensitas kekerabatan internal umat beragama akan semakin kuat, sehingga menumbuhkan perasaan saling percaya dan saling melindungi. Dengan adanya ritual dan perayaan keagamaan, penganut agama juga dituntut untuk mampu menghayati nilai-nilai agama yang dianutnya dan memberi manfaat pada pemeluk agama lain, melalui sikap saling menghormati, menghargai dan saling toleransi antar umat beragama.

Untuk memahami konsep tentang harmoni dalam keragaman ditinjau dari perspektif teori arsitektur perdamaian dalam kerangka hubungan antar umat Islam dengan Katolik, peneliti menggunakan beberapa teori yang terkait dengan tema tersebut. Teori-teori yang terkait dalam tema ini antara lain teori tentang arsitektur perdamaian, dimana untuk mencapai kehidupan yang damai diperlukan beberapa unsur, antara lain: *channels of communication, institution, integrative climate, peace leadership*, dan *just structure*. Berdasarkan teori tersebut, peneliti

¹²Brian Turner, “Symbol in Ndembu ritual”, in Victor Turner dalam Irwan Abdullah., *Simbol, Makna dan Pandangan Hidup J, the Forest of Symbol: aspects of Ndembu Ritual*. (Ithaca: Cornell University Press), p. 19) dalam Irwan Abdullah, *Simbol, Makna dan Pandangan Hidup Jawa. Analisis Gunung pada Upacara Jawa*, (Yogyakarta: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional), hal.9-10

¹³Irwan Abdullah, *op.cit.*, hal. 10

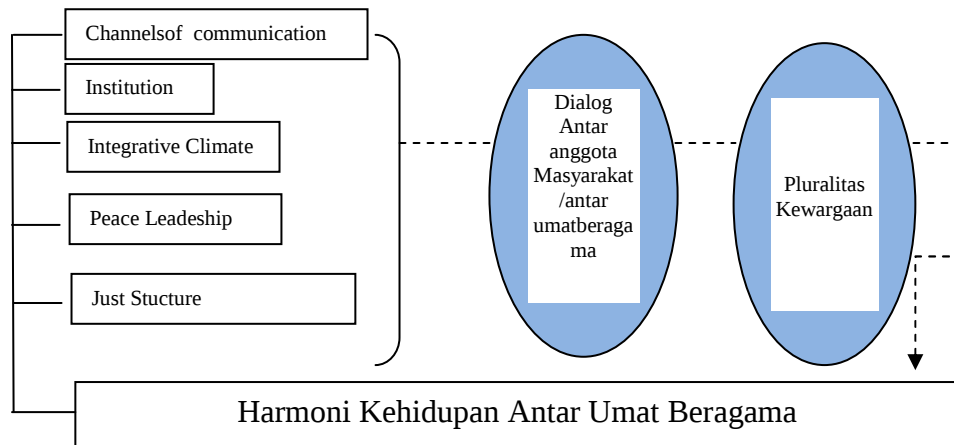
¹⁴Winick, Charles (1997), *Dictionary of Anthropology*. New Jersey: Littlefield, Adams & Company, p.105

berasumsi bahwa, tidak semua unsur harus eksis dan tampil secara maksimal dalam masyarakat, karena hal tersebut merupakan sesuatu yang sangat sulit diterapkan dalam masyarakat, apalagi dalam lingkup yang sangat sempit. Asumsi tersebut didasarkan pula pada pemikiran bahwa ketika masyarakat memiliki salah satu atau beberapa unsur dari konstruksi perdamaian tersebut sudah kuat dan menjadi dasar dalam cara pandang masyarakat dalam bersikap dan berperilaku, maka keharmonisan adalah sebuah keniscayaan bagi masyarakat tersebut.

Secara faktual asumsi ini juga di dasarkan pada fakta bahwa masyarakat di daerah pedesaan pada umumnya memiliki keunggulan dalam hal intensitas komunikasi antar anggota masyarakat yang sudah direproduksi dalam lembaga-lembaga kemasyarakatan baik yang bersifat non-formal maupun informal. Lembaga-lembaga kemasyarakatan inilah yang menjadi wadah atau *channels of communication* untuk saling berdialog, berkomunikasi tentang dinamika dalam kehidupan bermasyarakat. Semakin banyak institusi-institusi non-formal maupun informal dalam masyarakat maka akan menciptakan iklim kehidupan yang kondusif (*intergrative climate*), sebagai salah satu prasarat menuju kehidupan masyarakat yang harmonis.

Kondisi masyarakat yang harmonis yang mensyaratkan sebagian unsur-unsur dalam konstruksi perdamaian juga harus di dukung oleh sifat dan sikap untuk melakukan dialog antar umat beragama. Dialog antar umat beragama ini pada dasarnya bisa dianggap sebagai manifestasi dari adanya saluran komunikasi yang bagus (*channels of communication*) yang terbangun dalam masyarakat. Dari dialog antar umat beragama inilah yang diharapkan muncul sikap pluralitas kewargaan, dimana identitas-identitas yang ada dalam diri individu (agama, ras, budaya) bukan menjadi identitas pemisah, akan tetapi menyatu dalam identitas yang memiliki kepentingan lebih, lebih universal yaitu identitas kewargaan. Jadi dengan demikian harmoni kehidupan antar umat beragama dapat dianggap hasil atau buah dari sifat dan sikap masyarakat yang mengedepankan pada pluralitas kewargaan. Kerangka berfikir untuk memahami harmoni kehidupan dalam keragaman ditinjau dari konstruksi perdamaian hubungannya dengan dialog antar umat beragama dan pluralitas kewargaan dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar. 5
Kerangka Berpikir Harmoni Kehidupan:
Konstruksi Perdamaian dalam relasi interaksi antar umat beragama



PENUTUP

Harmoni kerukunan antar umat beragama dewasa ini menjadi sebuah harapan ditengah-tengah kehidupan antar umat beragama yang memiliki potensi terjadinya konflik. Ditinjau dari teori konstruksi perdamaian kerukunan antar umat beragama dapat dilihat dari beberapa unsur, antara lain: *effective channels of communication*, *effective system of arbitration*, *integrative climate (Bridging social capital)*, *critical mass of peace enhancing leadership* dan *just structure*). Dalam menciptakan perdamaian, unsur-unsur dalam kontruksi perdamaian pada dasarnya tidak mutlak secara keseluruhan harus terpenuhi akan tetapi sebagian dari unsur-unsur yang ada juga memiliki kontribusi dalam menciptakan kerukunan antar umat beragama. Kerukunan antar umat bergama dapat dilihat pada beberapa fenomena sosial, seperti terjadinya dialog antar umat beragama, terbentuknya civic asosiasi multi identitas, baik dari segi agama, etnis maupun ras. Unsur-unsur dalam kontruksi perdamaian pada dasarnya tidak semuanya harus terpenuhi, akan tetapi

DAFTAR PUSTAKA

- Ahnaf, Muhamad Iqbal, *Kontruksi Perdamaian, Makalah disampaikan dalam short-course metodologi Penelitian Keagamaan Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Kemenag RI-CRCS Sekolah Pasca Sarjana UGM*, 2011
- Abdullah. Irwan, *Simbol, Makna dan Pandangan Hidup Jawa. Analisis Gunung pada Upacara Jawa*, (Yogyakarta: Balai Kajian dan Sejarah Tradisional, 2002)
- _____, *Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)
- Bagir, Zainal Abidin, dkk, *Laporan Tahunan Kehidupan Beragama di Indonesia*, (Yogyakarta: CRCS UGM, 2011)
- Baqir, Zaenal Abidin, dkk, *Pluralisme Kewargaan. Arah Baru Budaya Politik Keragaman di Indonesia*, (Bandung: Mizan, 2011)
- Banawiratma, J.B., Bahir, Zaenal Abidin, Etc., *Dialog Antar Umat Beragama. Gagasan dan Praktik di Indonesia*, (Bandung: Mizan, 2010)
- Hendropuspito, *Sosiologi Agama*, (Yogyakarta: Kanisius, 1984)
- Pekan Kerukunan Antar Umat Beragaman, dalam <http://dpd.go.id/2011/03/pekan-kerukunan-antar-umat-beragama-sedunia/>, tanggal 01 maret 2011<http://dpd.go.id/2011/03/pekan-kerukunan-antar-umat-beragama-sedunia/>.
- Reychler, Luc (2006), *Challenges of Peace Reasearch*, International Journal of Peace Studies, Volume 11, Number 1, Spring/Summer, 2006
- Ritzer, George, Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi dari teori Sosiologi Klasik sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern*, Kreasi wacana, Yogyakarta, 2010, Judul asli Sociological Theory, Mc.Graw-Hill, New York, 2004)
- Turner, Victor W, “*Simbol in Ndebu Ritual*”, in Victor Turner, *The Forest of Symbol: Aspect of Ndebu Ritual*, (Ithaca: Cornell University Press, 1967)
- Varshney, Ashutosh, *Ethnic Conflic and Civic Life: Hindus and Muslims in India*, (Yale University Press, 2002)
- _____, *Ethnic Conflict and Civil Society: India and Beyond*, The John Hopkins Press, 2002 dalam <http://www.jstor.org/stable/25054154>
- Winick, Charles, *Dictionary of Antropology*. New Jersey: Littlefield, (Adams & Company, 1997)